KELUARGA SAKINAH (PERKAWINAN MENURUT ADAT DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU)

Ikrar Abadi

Staf Kanwil Kemenag Sumatera Barat

Email; ikrarabdi10@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Minangkabau dalam membentuk keluarga bagi mereka melalui garis keturunan perempuan sebagai pertalian darahnya. Sistem kekeluargaan inilah yang membuat suku Minangkabau berbeda dengan suku bangsa lain. Dengan system ini masyarakat Minangkabau telah memberikan tempat terbaik bagi kaum perempuan dalam lingkungan keluarga, kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau disebut dengan *Bundo Kanduang* yang diberikan wewenang yang kuat dalam mengelola rumah gadang. Sementara itu laki-laki dalam perkawinan di Minangkabau disebut sebagai *urang sumando*, hubungannya dengan isterinya dan keluarga isterinya hanya selama masih ada ikatan perkawinan. Ia tak ada mempunyai kekuasaan apa-apa di rumah isterinya terutama masalah harta pusaka. Begitu kuatnya konsep pemahaman masyarakat Minangkabau terhadap keluarga, serta juga bagaimana status kaum perempuan dalam keluarga sangat tinggi. Maka hal ini menjadi konsep ideal dalam sebuah rumah tangga bagi masyarakat Minangkabau. Seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, juga memiliki dampak dalam konsep masyarakat Minangkabau dalam membangun tatanan rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah sakali ai gadang sakali titian baraih*.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Adat, Perubahan Sosial, Minangkabau

1. Pendahuluan

Keluarga atau rumah tangga bagi orang muslim merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹ Keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Pernikahan merupakan pintu utama untuk membentuk sebuah keluarga, dan keluarga merupakan elemen terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama bagi umat Islam karena dikeluarga inilah awal terciptanya generasi Islam sebagai penyangga bangunan dari agama dan negara.² Bagi umat Islam pernikahan menjadi sesuatu yang sangat sakral, karena memiliki tujuan juga sakral, serta tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.³ Dalam Islam pernikahan itu memiliki tujuan untuk guna membentuk

¹Mustafa Masyhur, *Qudwah Di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h. 71

²Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h. 71

³Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19

keluarga yang bahagia, serta penuh dengan ketenangan dan rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS: Ar-Rum: 21) ⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia ini diciptakan dengan memiliki pasangan hidupnya, dan pasangan hidupnya ini diciptakan Allah agar manusia tersebut dapat hidup tentram bersama dalam sebuah bahtera rumahtangga. Dalam rumah tangga itu tercipta rasa kasih sayang, saling menghargai, dan juga kerelaan dalam melayani pasangan masing-masing dalam rangka meraih keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Dalam syari'at Islam ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan sangat mengikat pemeluknya, Islam mengajarkan pada setiap muslim bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Maka dalam Al Qur'an dijelaskan ikatan perkawinan dengan suatu diistilah "*mitsaaqan ghaliza*", suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil.⁵

Indonesia sebagai negara yang mayoritas menganut agama Islam telah mengkomodir upaya pembentukan keluarga *sakinah mawadah warahmah* itu dalam suatu peraturan perundang-undangan perkawinan, salah satunya adalah sejak tahun 1974 telah di undangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung didalam Al Quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqh klasik kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.⁶

Bila perkawinan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama mendaki, kelurah sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat perkawinan sedang berlangsung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing⁷.

Dalam Islam perkawinan yang menghasil keluarga *sakinah* bukan hanya sebatas yang berhubungan dengan tata hubungan seksual semata, akan tetapi di sana juga ada tata anak, tata ekonomi rumah tangga, tata rias, tata ruang, tata pekarangan, tata busana, tata masakan dan tata

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Toha Putra, 1996), h. 644

⁵M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 11

⁶M. Anshary MK, *Op.Cit.*, h. 12

⁷Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005) , h. 158

ibadah.⁸Begitu pula bagi masyarakat Minangkabau⁹ yang secara kultural selalu menjadikan *Adat Alam Minangkabau* menjadi dasar bangunan kehidupan mereka. Bagi orang Minang, adat merupakan kompleksitas suatu komunitas dari kebiasaan, norma-norma, kepercayaan dan etiket yang mempunyai arti ganda yaitu adat berarti kumpulan kebiasaan setempat, dan adat juga dianggap sebagai *a complex structure system* masyarakat.¹⁰

Minangkabau merupakan daerah di Indonesia yang kuat adat istiadatnya dengan falsafah adatnya *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai*¹¹ yang kemudian dilengkapi dengan *Alam Takambang Jadi Guru* sebagai nilai dasar dalam menata masyarakat Minangkabau, yang kemudian dikukuhkan dalam Sumpah Satie Bukit Marapalam pada tahun 1837 di Bukit Pato, Lintau, dekat Batu Sangkar.¹²

Peristiwa ini merupakan titik klimaks proses integrasi nilai-nilai ajaran Islam dengan budaya Minangkabau. Kesepakatan antar ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam perang Paderi di abad ke-19 dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu diperkuat rapat urang ampek jinh yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh kesimpulan seminar hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada bulan Juli 1968.¹³

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Apalagi bagi masyarakat di Minangkabau memandang bahwa hukum merupakan pandangan hidup yang bersifat abadi, mereka merasa pandangan hidup itu sama tuanya dengan kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Masyarakat Minangkabau yakin bahwa pandangan hidup itu akan kekal sepanjang masa selama masyarakat Minangkabau itu masih ada. Hal ini diungkapkan dengan satu peribahasa *tak lakang dek paneh, tak lapuk de hujan*.¹⁴

⁸Disarikan dari buku Bagindo M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), h. 11-35

⁹Masyarakat Minangkabau tersusun atas dasar keibuan, yang menjadi puncak di dalam rumah ialah nenek yang perempuan. Harta benda yang dicari dan diusahakan ialah untuk mempergemuk harta kepunyaan suku. Orang laki-laki takluk kepada kaum ibu. Meskipun dia berusaha, bersawah, berladang, meneroka, gunnya bukanlah buat anaknya, tetapi untuk kemenakannya. Pada rumah adanya dia hanya menjada orang samanda. Pada ada asal suami tidak wajib memberi nafkah kepada isteri, dan sampai sekarang di tempat yang kuat memegang adat, amat malu isteri yang meminta belanja kepada suami, memberi malu kepada mamaknya dan perkaumannya, karena yang memberi belanja anak itu telah ada bukan ayahnya tetapi mamaknya pula. (Lihat. Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, ttp:Pustaka Dini Sdn Bhd, 2006, h. 27). Masyarakat Minangkabau merupakan komunitas yang cepat bersinggungan dengan ajaran Islam. Komunitas Minangkabau telah disentuh peradaban Islam lebih kurang tiga abad yang silam. (baca: Amir Sjarifoedin Tj.A, *Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, Jakarta: PT Gria Media Prima, 2011, h. 7).

¹⁰Nurus Shalihin, *Demokrasi di Nagarnya Para Tuan*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2014), h. 16

¹¹*Adat Basandi syarak, syarak basandi kitabullah* merupakan dasar-dasar dalam menjalankan kehidupan bagi keluarga matrilineal, yaitu Minangkabau dan Islam. Hal ini merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat harus bersandikan pada adat Minangkabau dan Islam. (baca: Jamaris Jamna, *Pendidikan Matrilineal*, Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau, 2004. h. 77). Keterpaduan antara adat dan syara' secara eksplisit tercermin dalam data kehidupan masyarakat dimana ada istilah *tigo tungku sajarangan* atau *tali tigo sapilin* yang menanta kehidupan dalam masyarakat yakni, *ninik mamak, alim ulama* dan *cadiak pandai*. (baca: Hayati Nizar, *Bundo Kandung dalam Kajian Islam dan Budaya*, Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau, 2004. h. 2)

¹²Duski Samad, "Tradisionalisme Islam di Minangkabau: Dinamika, Perubahan dan Kontinuitasnya", Tajdid: Jurnal Nasional Ilmu-ilmu Ushuluddin (Juli 2003), vol 6, no. 2, 121

¹³*Ibid*

¹⁴Syafrudin Halimy Kamaluddin, *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 12

Dalam pandangan masyarakat adat secara umumnya, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.¹⁵ Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Minangkabau menganut sistem *Eksogami*, yakni mencari jodoh diluar lingkungan kerabat *matrilineal*. Sistem ini tidak mengenal pembayaran “jujur” atau “kawin jujur” seperti di Tapanuli. Seseorang yang telah berumah tangga tetap menjadi kerabat asalnya, suami dirumah isteri disebut “*urang sumando*” dan tidak masuk kedalam kerabat anak-anaknya. Pada saat perkawinan suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat untuk dibawa kerumah isteri dengan nama “*alek malapeh marapulai*”¹⁷.

Menurut Daud Ali dkk, menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau dalam menentukan keluarga bagi mereka hanya melalui penghubung perempuan sebagai saluran darahnya.¹⁸ Sistem kekeluargaan inilah yang membuat suku Minangkabau berbeda dengan suku bangsa lain. Dengan system ini masyarakat Minangkabau telah memberikan tempat terbaik bagi kaum perempuan dalam lingkungan keluarga, kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau disebut dengan Bundo Kanduang yang diberikan wewenang yang kuat dalam mengelola rumah gadang melalui pepatah minang di bawah ini:

“*Bundo Kanduang, limpapeh rumah nan gadang, amban paruak pagangan kunci, amba puro aluang bunian, pusek jalo kampulan tali, Sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, nan gadang basa batua, kok iduik tampek banasa, kok mati tampek baniaik, ka unduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo*”

Makna yang tergambar dalam dalam pepatah ini adalah memberikan domain atau ranah wewenang pada perempuan Minangkabau. Domain atau ranah itu adalah rumah gadang yang merupakan areal kekuasaan perempuan. Perempuan terpelihara dari segala bentuk perbuatan yang menjatuhkan martabat kaum sampai pada orang penyimpan dan pemelihara harta pusako dan sako.¹⁹ Di Minangkabau ibu merupakan basis pembentukan martabat masyarakat, rusaknya kaum ibu akan rusak kehormatan orang Minang. Tanpa Ibu rumpun masyarakat Minang akan punah, bahkan mengancam bangkrutnya harta pusaka.²⁰

Sementara itu laki-laki dalam perkawinan di Minangkabau disebut sebagai *urang sumando*, hubungannya dengan isterinya dan keluarga isterinya hanya selama masih ada ikatan perkawinan. Ia tak ada mempunyai kekuasaan apa-apa di rumah isterinya terutama masalah harta pusaka. Karena *urang sumando* itu disamakan dengan abu di atas tungku, datang angin keras ia terbang.²¹

¹⁵Moerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988), h. 55

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandur Maju, 2007), h. 5

¹⁷Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam : Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Andalas University Press, 2006), h. 137

¹⁸Muhammad Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 29

¹⁹Sri Setyawati, *Dari Pedalaman Minangkabau ke Pelosok Mentawai, Perempuan, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Adat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), h. 54

²⁰Yurizal Yunus, *Minangkabau Social Movement*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), h. 379

²¹Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, Cet. XIII, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, tt), h. 192

Kemudian anak yang dilahirkan hasil suatu perkawinan menjadi anggota kaum isteri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, bahkan terhadap rumah tangganya.²² Di samping itu dengan prinsip keturunan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai ke segala urusan. Perkawinan dalam adat Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili.²³

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau membina keluarga *sakinah mawadah warahmah* itu, bukan hanya sebatas kewajiban seorang suami ataupun istri, namun berbagai kalangan memiliki peranan satu sama lain yang saling berkaitan. Apa lagi jika dilihat sejarah kehidupan masyarakat Minangkabau, *rumah gadang*²⁴ menjadi sebagai tempat untuk menempa terbentuknya keluarga sakinah itu. *Rumah gadang* ini umumnya didiami oleh tiga generasi, dan karena itu terdiri dari beberapa anak perempuan, anak laki-laki, ibu mereka dan saudara laki-laki dari ibu mereka (mamak), saudara-saudara perempuan dari ibu mereka (acu/etek) dengan anak-anaknya, nenek, anak perempuan dari etek-etek mereka, dan lain-lainnya.²⁵

Di *rumah gadang* ini mamak memiliki peranan strategis dalam membina kemenakannya. Nenek moyang orang minang menjadi rumah gadang sebagai tempat untuk melakukan pengawasan langsung bagi saudara perempuan dan kemenakannya. Sehingga ada suatu kebaikan yang dapat dilihat dalam kehidupan di rumah gadang yaitu jika seorang isteri dicerai oleh suaminya, atau anak-anak menjadi paitu ditinggal ayah atau ibunya, penghidupan mereka dijamin oleh mamak rumah, yang memegang kekuasaan atas harta benda komunal untuk kesejahteraan anggota-anggota kelompoknya.²⁶ Hal ini tidak terlepas dari fungsi mamak dalam system kekerabatan di Minangkabau, seorang mamak berfungsi mengayomi, melindungi, mendidik, dan mengarahkan kemenakannya agar memiliki masa depan yang lebih baik dan sejahtera.²⁷

Begitu kuatnya konsep pemahaman masyarakat Minangkabau terhadap keluarga, serta juga bagaimana status kaum perempuan dalam keluarga sangat tinggi. Maka hal ini menjadi konsep ideal dalam sebuah rumah tangga bagi masyarakat Minangkabau. Jika hal ini berjalan dengan baik serta tidak terjadi perubahan dalam pemahaman masyarakat terhadap keluarga, maka berbagai kasus perceraian tidak akan mudah terjadi. Ditambah lagi dengan negarapun telah hadir untuk memberikan perlindungan utuhnya dalam sebuah bentuk undang-undang perkawinan, yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang –undang ini menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.²⁸

²²A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Padang: Grafika Jaya Sumbar, 2015), h. 218

²³Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau*, (Jakarta: CV. Karya Indah, 1983), h. 10

²⁴Rumah gadang ini dibuat berbentuk empat persegi panjang dan dibagi atas dua bagian muda dan belakang. Umumnya berbahan kayu, dan sepintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang khas, menonjol seperti tanduk kerbau yang biasa disebut gonjong. Dahulu kala, atap ini berbahan ijuk sebelum berganti dengan atap seng. (baca: Amir Sjarifoedin Tj. A, *Op.Cit.*, h. 129).

²⁵Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Padang: Center For Minangkabau Studies Press, 1969), h. 24

²⁶*Ibid*

²⁷Widia Fithri, *Mau Kemana Minangkabau? Analisis Hermeneutika atas Perdebatan Islam dan Adat Minangkabau*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2013), h. 89

²⁸K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 3

Tujuan Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 secara jelas menyebutkan bahwasanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Kemudian selang beberapa tahun kemudian, pemerintah menunjukkan kehadirannya kembali dalam membuat peraturan tentang perkawinan. Pada tahun 1991, pemerintah menerbitkan INPRES No.1 tahun 1991 yang biasa disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil tentang peraturan yang digunakan dalam lingkup Peradilan Agama. Paling tidak ada tiga hal yang terungkap dengan munculnya KHI, diantaranya: pertama, adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial. Kedua, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. Ketiga, respon struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan alim ulama Indonesia yang mengantisipasi ketiga hal tersebut dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.³⁰

Di era globalisasi ini mengakibatkan terjadi pergeseran pemahaman dalam memahami pembentukan suatu keluarga, dan seharusnya masyarakat Minangkabau tidak terjebak dalam pemikiran kapitalis secular di atas, yang membebaskan perempuan di ranah publik, tetapi hakekatnya tidak menghormati hak azazi perempuan untuk selalu harus dilindungi, dihormati, dimanjakan, dan diberi keleluasaan untuk menyenangkan hati suami dan anak anaknya.³¹

Masyarakat Minangkabau memahami bahwa selama adat dipakai dia tetap akan menjadi baru, dengan falsafahnya *Adat dipakai baru, Guru nan tak mati, Surek nan tidak ilang, Alam Takambang jadi guru nan Kitab terkembang lebar*.³² Meskipun ada yang baru datang sifatnya adalah memperkuat yang lama, dan adat lama tidak akan berubah. Orang minang seharusnya tidak takut dengan adanya perubahan, tidak harus risau dengan adatnya akan hilang. Orang Minang menerima pembaharuan, *sakali ayia gadang, sakali tapain barubah, Namun aia kailia juo sakali gadang baganti Sakali peraturan barubah Namun adat baitu juo* (sekali air besar, sekali tepian berubah, namun air ke hilir juga, sekali besar berganti, sekali peraturan berubah, namun adat begitu juga). Menurut pandangan hidup orang Minangkabau ada unsur-unsur adat yang bersifat tetap ada yang tidak bisa berubah. Yang tetap itu biasa dikatakan *nan indak lapuak dek hujan, nan indak lakan di paneh*, (yang tidak lapuk karena hujan, yang tidak lekang karena panas). Dengan demikian tentu saja bagi masyarakat Minangkabau bagaimanapun perubahan yang dibawa oleh globalisasi namun mereka tidak akan mudah terpengaruh terutama dalam masalah yang dibahas yaitu tetap pada tujuan perkawinan menciptakan keluarga sakinah.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

²⁹Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI, 2015), h. 22

³⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 61

³¹Selengkapnya: <http://www.kompasiana.com/andrise/globalisasi-perempuan-minang-antara-adat-agama-dan-serbuan-budaya-feminis-kapitalis>

³²Yurizal Yunus, *Op.Cit.*, h. 1

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat³³ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah³⁴

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bagaimana konsep keluarga Sakinah dilihat dari sudut pandang regulasi perundang-undangan, hukum Islam dan prakteknya dalam adat Minangkabau.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis yuridis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata³⁵ pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke masyarakat yang menjadi objek penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan (UU No 1 Tahun 1974 dan KHI), Hukum Islam dan Adat Minangkabau.

3. Hasil Dan Pembahasan

Bagi orang di Sumatera Barat, terutama orang Minang, tujuan perkawinan itu dapat dibagi atas beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi adat itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Amatlah janggalnya kalau seorang tidak kawin selama hidupnya dan kalau ini kejadian maka orang yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kekurangan sesuatu. Perasaan ini tidak saja dialami oleh yang bersangkutan saja tetapi juga oleh segenap anggota keluarga ibunya bahkan anggota sukunya. Betapa pentingnya perkawinan ini dinyatakan dalam pepatah:

Tak aia talang dipancuang

Tak kayu janjang dikapiang

Tak ameh bungka diasah

(Tak ada air talang dipancung

Tak ada kayu tangga dikeping

*Tak emas bungkal diasah)*³⁶

Seorang anak yang telah dewasa (baik laki-laki maupun perempuan) dan akan berumah tangga, bagi masyarakat Minang menempatkan perkawinan menjadi urusan keluarga dan kerabat. Dimulai dari mencarikan jodoh, membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan perkawinan, termasuk segala urusan akibat perkawinan itu. Karena perkawinan dalam adat bukanlah masalah sepasang insân yang akan membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minang menjadikan kaum (suku) hidup bersamasama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi suami isteri tidak bisa dilepaskan dari masalah bersama.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta. Sinar Grafika,2002) h. 15

³⁴ *Ibid.*,h.16

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hhukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). h. 51

³⁶ Azami dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 1977-1978, h. 22

Dalam pelaksanaan pesta perkawinan, peranan ibu-ibu sebagai *Bundo Kandung* pada hakikatnya berimbang dengan peran laki-laki sebagai mamak. Di mana biasanya mamak mengurus administrasi perkawinan seperti memberikan izin, sementara perempuan mempersiapkan segala sesuatu yang bersifat domestik misalnya, makanan, perlengkapan pesta, dan lain-lain. Untuk menentukan orang-orang yang akan diundang, biasanya laki-laki dan perempuan duduk bersama dan menginventarisir nama-nama mereka, bahkan peran perempuan lebih dominan. Ia memberikan pengarahan kepada orang-orang yang ditugaskan untuk mengundang tamu yang diharapkan kehadirannya ketika pesta dengan arahan yang rinci, sampai kepada kalimat yang akan disampaikan oleh petugas yang melakukan pemanggilan tersebut, terutama kepada petugas yang masih muda dan belum berpengalaman dalam hal itu. Sementara peranan bako (keluarga ayah) dalam pelaksanaan pesta biasanya sebagian ikut membantu memikul biaya pesta perkawinan sesuai dengan kemampuan mereka yang dilakukan sebelum akad nikah. Mereka juga datang membawa perlengkapan seperti sirih lengkap, singgang ayam, dan seperangkat busana bahkan ada yang memberikan perhiasan emas untuk mempelai perempuan.

Setelah perkawinan dilaksanakan, dampak langsung dari perkawinan tersebut antara lain dapat mengangkat harga diri dan status mereka dalam keluarga dan masyarakat. Seseorang akan mendapat tempat dalam masyarakat, diakui keberadaannya, dan diikutsertakan dalam musyawarah (dapek dilawan baiyo) dan dapat dibebani tugas tertentu secara adat termasuk berhak diberi gelar kebangsawanan (datuk atau penghulu) apabila ia telah mencapai status alah gadang (sudah besar). Status alah gadang diperoleh bila seseorang telah kawin. Sebagai analogi konsep adat tersebut, bila seseorang belum kawin meskipun umurnya sudah tua, tetapi ia masih tetap dikategorikan pada anak-anak dan anak-anak tidak dapat dibebani tugas sosial secara adat.

Sistem adat yang paling menonjol dalam suku Minangkabau adalah sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Selain aturan adat yang khas, suku Minangkabau juga memiliki hukum adat yang khas. Salah satunya adalah hukum adat yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan di Minangkabau menggunakan ketentuan syara' (Agama) dan adat, masyarakat Minangkabau mempunyai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perkawinan, diantaranya :

1. Kedua calon mempelai harus beragama islam
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Dalam adat Minangkabau ada perkawinan yang ideal dan dianjurkan untuk dilaksanakan. Perkawinan ideal dilakukan, apabila terjadi perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Begitu juga sebaliknya, ada perkawinan yang kurang ideal sehingga tidak dianjurkan untuk dilaksanakan, diantaranya *perkawinan pulang ka mamak/pulang ka bako*. *Perkawinan ambil mengambil*, *Perkawinan awak sama awak*,

Secara umum proses peminangan bagi masyarakat Minangkabau diprakarsai pihak perempuan. Bila calon suami untuk si gadis sudah ditemukan, dimulailah perundingan para kerabat untuk membicarakan calon itu. Pinangan dilakukan oleh utusan yang dipimpin mamak si gadis. Jika pinangan diterima perkawinan bisa dilaksanakan.

Jika hal ini dihubungkan dengan peminang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka dalam hukum Islam peminangan ini disebut dengan *khitbah*. Islam mensyariatkan *khitbah* agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami, dengan melakukan *khitbah* (meminang) akan mengenal empat kriteria calon istrinya.³⁷ Seperti disyariatkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاتَّقِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ بِذَلِكَ³⁸

Terjemahan:

Di ceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari 'abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa'id Ibn Abi Sa'id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung."(H.R. Imam Bukhari).

Selain itu, *khitbah* juga mempunyai tujuan-tujuan diantaranya untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak, juga agar perkawinannya itu sendiri dapat berjalan atas dasar pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi suasana kekeluargaan nantinya akan bejalan erat antara suami, istri, anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya. *Khitbah* hanya sebagai sarana yang mengantarkan kepada peristiwa nikah. Memang terdapat didalam Al-Qur'an dan dalam banyak Hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan,

Di samping itu dalam sistem perkawinan masyarakat Minangkabau ada larangan perkawinan yang masih bertahan sampai saat ini, yaitu larangan perkawinan sesuku. Dimana alasan ini disebabkan oleh anggapan masyarakat Minangkabau bahwa mereka yang terikat dalam satu suku masih dalam satu tali persaudaraan, sehingga jika perkawinan itu telah dilangsungkan maka akan menyebabkan keturunan lemah di kemudian hari, sehingga hal ini menjadi suatu perhatian bagi masyarakat Minangkabau dari dahulu sampai sekarang. Dasar kehidupan orang Minang adalah hidup berkelompok, bukan individual. Pembentukan kelompok diatur sesuai ketentuan garis ibu, yang lazim disebut dengan sistem kekerabatan *Matrilineal*. Begitupun dalam mengelompokkan suku. Untuk pengkategorian cinta satu suku di Minangkabau, ada lima kategori sebagai berikut ini.

Pertama, Sasuku-saparuik. Artinya, seorang lelaki dan perempuan adalah sepersukuan dan bertalian darah langsung yang berasal dari satu nenek, buyut dan seterusnya ke atas. Pernikahan dalam kategori ini dilarang dalam adat Minangkabau, dan bila ada yang melanggar, maka hukumannya sangatlah berat, yaitu diusir dari kampung dan tak mempunyai hak atas kaum dan nagarinya. Karena ini adalah hubungan yang masih dalam satu keluarga besar. Jika pernikahan *sasuku-saparuik* dibiarkan terjadi, akan merusak susunan hubungan kekeluargaan dalam suku tersebut. Jika mempunyai anak, maka anaknya sendiri adalah kemenakannya, mamak rumahnya adalah dunsaknya. Dan jika terdapat perselisihan antara keduanya dikhawatirkan akan merusak hubungan satu suku atau keluarga besar.

Kedua, Sasuku-sapayuang. Kondisi ini adalah ketika seorang lelaki dan perempuan yang sepersukuan berasal dari nenek yang berbeda namun masih satu Datuk (penghulu kaum). Kondisi ini masih dibilang berat dan hukumannya sama dengan pernikahan *sasuku-saparuik*. Akan tetapi di

³⁷ Syaikh kamil Muhammad, uwaidah, *Fiqih Wanita* Edisi, Penerjemahan M. Abdul Fhoffar E.M (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 397

³⁸ Muhammad bin Al-Bukhari Al Ju`fi, *Shahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz.3, h. 368

beberapa nagari ada yang memberi toleransi namun tetap dengan membebaskan denda yang terbilang berat. Perkawinan sasuku-sapayung sangat jarang terjadi, terlebih saat ini kecenderungan untuk mencari jodoh diluar suku lebih besar karena beberapa faktor seperti merantau, pekerjaan dan lain-lain sebagainya.

Ketiga, Sasuku-sakampung. Pada kondisi ini, seorang lelaki dan perempuan memiliki satu suku yang sama namun tidak satu datuak, hanya satu kampung. Hukuman untuk pernikahan ini sama halnya dengan kedua kondisi di atas. Di beberapa nagari menghukum tak boleh kembali ke nagari, di beberapa nagari ada juga yang menjatuhkan sanksi berupa denda.

Keempat, Sasuku-sanagari. Memiliki suku yang sama, namun tidak satu nenek, tidak satu Datuk, dan tidak satu kampung, hanya satu nagari (setingkat kelurahan). Umumnya hukuman untuk kondisi ini adalah sama dengan poin tiga.

Kelima, Sasuku-sajo. Kondisi ini adalah yang paling ringan dimana hanya nama suku saja yang sama, sementara nagari, kampung dan lainnya sudah berbeda. Umumnya kondisi seperti ini diperbolehkan untuk menikah, meskipun akan mendapatkan pertentangan.

Di Minangkabau terdapat aturan mengenai larangan perkawinan yang disebut dengan “perkawinan pantang”. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal. Se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis atau tidak se-nagari. Masyarakat Minangkabau memegang prinsip eksogami suku dan eksogami kampung, dan yang menonjol adalah eksogami suku. Pada eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku sikumbang tidak boleh kawin dengan sesama suku sikumbang. Larangan sesuku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun temurun. Bagi yang melakukannya berarti sama dengan kawin seketurunan. Hal ini berawal dari suku asal di Minangkabau yakni Bodi dan Caniago dan Koto dan Piliang dan suku-suku yang sekarang adalah pecahan dari empat suku tersebut, maka sulit menentukan siapa saja yang sepesukuan yang tidak boleh untuk dinikahi, dan siapa pula sebaliknya. Andaikata suku itu hanya tetap empat saja seperti suku asal maka pantangan kawin akan sangat ketat sekali.

Penerapan kawin pantang ini tidak sama wilayah Minangkabau. Sebagian besar Luhak 50 Koto dan Luhak Tanah Datar tetap memberlakukan pantangan kawin se-suku, kendati berbeda penghulu dan sudah berjarak jauh. Prinsipnya, selagi dapat ditelusuri silsilah kesamaan suku, selama itu pula pantangan perkawinan diberlakukan. Sedangkan sebahagian Luhak Agam sudah ada kecenderungan melonggarkannya. Kawin sepesukuan yang berlainan nagari (suku sama, penghulu berbeda) boleh kawin. Bahkan dalam satu nagari yang pada mulanya berasal dari satu suku dengan penghulu baru, boleh saja kawin, asal tidak seketurunan dalam arti serumah gadang, sepandam pekuburan dan seharga pusaka. Ada juga yang menerapkan aturan yang sangat ketat dalam luhak yang sama, asal sesuku kendati berlainan nagari tetap tidak boleh saling kawin.

Oleh karena beragam cara memahami se-suku, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Ucapan yang sering muncul adalah, “*lain padang lain belalangnya, lain lubuk lain pula ikannya*” (lain negeri lain pula adat istiadatnya). Istilah ini sebenarnya bagian dari “adat yang teradat”, bukan “adat yang sebenarnya” seperti aturan perkawinan. Karena tata cara perkawinan Islam sangat diperhatikan oleh adat, maka para ahli hukum memasukkannya dalam “adat yang sebenarnya”. Perkawinan se-suku di samping dapat mengaburkan pertalian darah menurut garis matrilineal, juga dapat menyuburkan pertengkaran antar kaum di nagari lain. Pada dasarnya, satu suku di Minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan ini karena mereka

menyadari bahwa agama tidak melarangnya. Pelanggaran terhadap adat semata-mata sebagai dampak dari melakukan suatu tindakan yang tidak dilarang oleh agama tersebut.³⁹

Selanjutnya ditilik dari peran suami Isteri dalam keluarga menurut hukum Adat Minangkabau sangat erat hubungannya dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat Matrilineal. Dalam hal ini terlihat bagaimana berlangsungnya proses sosialisasi kekerabatan dalam masyarakat minangkabau itu. Dalam hukum kekerabatan Minangkabau ini ayah tidak begitu banyak peranannya, hubungan ayah dengan anak dan istri adalah sangat renggang, karena seorang ayah lebih bertanggung jawab terhadap kemenakan dan kaum kerabat ditempat ibunya.

Akan tetapi dalam tatanan global, suasana kebudayaan lebih didominasi oleh sistem patriaki. Setiap keluarga Minangkabau (ayah, ibu dan anak-anak mereka) kini, hidup dalam Rumah sendiri masing-masing. Keluarga atau rumah tangga Minangkabau sekarang, sama saja dengan keluarga di Batak ataupun di Jawa, hidup dalam rumah masing-masing secara mandiri. Pada masa dahulu, sewaktu anak-anak dan ibu mereka masih hidup dan bertempat tinggal dalam Rumah Gadang, maka anak-anak mereka dibina oleh Mamak(dari garis keturunan ibu mereka). Ayah tidak banyak tinggal di rumah gadang itu. Pada masa kini, setiap keluarga Minangkabau (ayah, ibu dan anak-anak mereka) hidup secara tersendiri di rumah masing-masing. Tidak lagi dalam Rumah Gadang.

Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada kerabat pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak perempuanlah yang menjadi pemerksa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Mulai dari mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, sampai dengan memikul segala yang ditimbulkan dari perkawinan itu. Keluarga sakinah dalam konsep masyarakat minangkabau adalah keluarga yang berkaraktek, tidak perlu berbicara masalah berapa jumlah anak, meskipun dua anak katanya cukup, namun jika tidak ada karekterk dalam keluarga tersebut maka akan hanya juga. Maka keluarga sakinah itu adalah keluarga yang berkarakter.

Kemudian dalam tantan adat minangkabau juga dikenal pada saat menjalani kehidupan rumah tangga dalam beprilaku dan bergaul suami istri harus ramah dan jujur serta jauh dari sifat kasar. Istri harus bersikap ramah kepada suami dan suami pun harus ramah kepada istri. Dalam menjalani rumah tangga pertengkaran-pertengkaran kecil bisa saja terjadi antara suami istri, anak-anak, mertua dll, apabila pertengkaran ini terjadi maka selesaikan secara baik-baik dan jangan sampai orang lain mengetahui pertengkaran itu, apabila suami istri bertengkar maka selesaikan dulu secara berdua (kusuik bulu cotok manyalasaikan) dan apabila telah selesai dan berdamai maka suami istri tidak perlu menaruh dendam begitu juga dengan anggota keluarga lainnya.

Jokok bakato ambiak bawah

lamah di lua kuek di dalam

Muluik manih kucindan murah

muko janiah indak pandandam

Perkawinan di Minangkabau merupakan jenis perkawinan eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar suku. Suku disini maksudnya adalah tetap dalam suku Minangkabau namun tidak sejenis. Hal ini dikarenakan adanya anggapan apabila masih dalam satu suku yang sama, maka kedua individu itu bersaudara. Selain itu, guna dianjurkan hal tersebut adalah untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi seperti perebutan harta warisan. Selain itu, di Minangkabau juga tidak dianjurkan menikah dengan orang di luar suku Minangkabau. Kejadian yang demikian dalam interaksi sosial

³⁹ *Ibid.*, h. 145-146

adakalanya mengandung arti yang positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif nantinya dalam menyatakan identitas suku bangsa (etnik) dari masing-masing individu yang telah melakukan ikatan perkawinan.

Dalam perkawinan campuran, masalah yang banyak muncul lebih banyak dirasakan oleh anak atau keturunan buah dari hasil perkawinan dua suku yang berbeda yang dibelenggu oleh ketentuan adat dari masing-masing suku bangsa, anak sering tidak mendapatkan status sosial dan hak waris sebagai keturunan orang tuanya akibat perkawinan campuran antar suku bangsa yang terhambat oleh ketentuan adat kedua orang tua yang berbeda suku bangsa. Seharusnya sebagai keturunan dari suatu hasil perkawinan, si anak memiliki hak untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dari keluarga si bapak dan ibunya, serta memiliki hak waris dari hubungan perkawinan kedua orang tuanya.

Barth yang menyatakan bahwa; identitas etnik itu bersifat askriptif, karena dengan identitas maka seseorang diklasifikasikan atas identitasnya yang paling umum dan mendasar yaitu berdasarkan atas tempat atau asalnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa batas-batas antar etnik itu tetap ada walaupun terjadi proses saling penetrasi kebudayaan di antara dua etnik yang berbeda. Selanjutnya Barth berpendapat bahwa; perbedaan-perbedaan kebudayaan tetap selalu ada walaupun kontak antar etnik dan saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok etnik itu terjadi.

Bagaimanapun juga kemajemukan masyarakat di suatu wilayah merupakan sebagian dari masyarakat Indonesia, yang walaupun kecil jumlahnya akan tetapi besar perannya, baik dalam peran ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, satu budaya tidak bisa menghindar dari sentuhan budaya lain tersebut manusia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan orang lain, sehingga menyebabkan terjadinya hubungan masyarakat satu budaya dengan masyarakat budaya lainnya.

Tujuan Nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada tujuan umum disyaratkannya pernikahan yaitu seperti halnya yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Pada adat perkawinan Minangkabau terdapat syarat yang harus dipenuhi dan ditaati sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah kedua calon mempelai harus beragama Islam, Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain, Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak, Calon marapulai (Suami) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.⁴⁰ Adat Minang dalam meminang jika bujang dan gadis sudah berkenalan atau orang tua berkeinginan meminang seorang gadis atau bujang dalam rangka mencari jodoh bagi anak kemenakannya, maka penjajakan dan peminangan dilakukan oleh orang tua. Peminangan dilakukan oleh mamak dari pihak wanita.⁴¹

Dalam hukum adat Minangkabau perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata“, tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan ketetanggaaan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat

⁴⁰Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Citra Harta Prima,2011), h. 12

⁴¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1990),h. 109

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Dengan demikian dapat di pahami bahwa keluarga sekinah dalam adat minangkabau, memiliki makna yang luas bukan hanya sebatas pada keluarga kecil yang disebut ayah, ibu dan anak, namun juga disana tercakup pada kaum kerabat, anak kemanakan. Seorang ayah dalam adat Minangkabau memiliki peran ganda bukan hanya dia harus berhasil dalam membentuk karakter dalam lingkungan keluarga kecil, namun di satu sisi dia juga harus dapat membentuk karakter kemenakannya. Apa lagi jika seorang Ayah tersebut merupakan golong datuk dalam kaumnya, maka cakupan tanggung jawabnyapun lebih luas lagi, yaitu kaum sesukunya yang harus pula menjadi perhatiannya.

Akan tetapi menurut Salmadanis dan Duski Samad, di zaman modern ini, kehidupan berubah dari sektor agrarian menjadi sektor jasa dan industri, maka sebagian keluarga minang terutama di rantau telah berubah cenderung kearah pembentukan keluarga batih dalam sistem *patrilineal* atau sistem keluarga barat dimana bapak merasa dirinya sebagai kepala keluarga dan sekaligus sebagai kepala kaum menggantikan kedudukan mamak.⁴² Menurut Salmadanis dan Duski Samad hal ini yang menyebabkan kerusakan pada tatanan sistem kekerabatan keluarga minang dan memunculkan jenis sumando baru yang *sumando gadang malendo* yaitu sumando yang tanpa malu telah menempatkan dirinya sendiri sebagai kepala kaum, sehingga menulitkan kedudukan mamak terhadap para kemenakannya.⁴³

Di sisi lain, seorang ibu juga tidak kalah pentingnya dalam tatanan adat minangkabau dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah tersebut, dia harus mampu menempatkan dirinya menjadi ibu di rumah tangga, dan juga *Bundo Kanduang* dalam kaumnya, harus menjadi *limpapeh rumah gadang* dengan segala sikap keibuan yang harus tetap melekat, karena ibu tempat bertanya, ditiru dan menjadi teladan dalam lingkungan keluarga. Dalam artian kata, ibu (*bundokanduang*) tidak hanya harus membentengi anak-anaknya, namun juga harus memelihara harta pusaka, adat dan budaya yang ada dalam adat Minangkabau.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sesuai dengan pokok pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minangkabau, di dalam Pinang-Meminang lazimnya di prakarsai kerabat pihak perempuan, apabila seorang gadis di Minangkabau telah tiba saatnya untuk menikah, maka kerabatnya sudah mulai melihat-lihat jejak mana yang pantas untuk jadi suami dari anaknya. Masyarakat Minangkabau tradisional misalnya, mendefinisikan gadis-gadis dan laki-laki yang belum menikah sebagai kanak-kanak. Jika telah ditemukan, maka berundinglah para kerabatnya untuk melakukan perbincangan untuk keadaan calon yang dimaksud tersebut. Setelah para kerabat itu menjalin sebuah kesepakatan, maka dilakukan lah utusan dari pihak perempuan untuk pergi menemui pihak dari laki-laki tersebut untuk menanyakan hari yang tepat untuk proses Pinang-Meminang tersebut bisa dilakukan. Setelah terjadi kesepakatan, maka ditentukanlah hari yang tepat agar pertemuan antara kedua belah pihak bisa dilaksanakan, dan jika hal ini dikaji dari ajaran Islam terkesan ada perbedaan jika dalam Islam yang meminang adalah pihak laki-laki, namun dalam adat Minangkabau adalah yang meminang adalah pihak perempuan.

⁴²Salmadanis dan Duski Samad, *Op.Ci.*, h.130

⁴³*Ibid*

Menikah dengan lingkungan kerabat matrilineal dinamakan juga dengan istilah kawin sapayuang (Nikah Sesuku). Ini merupakan larangan dalam adat Minangkabau. Bagi mereka yang melakukan Kawin Sapayuang (Nikah Sesuku), maka ia akan dikenakan sanksi adat, yaitu berupa sanksi sosial dan sanksi materil. Suami dalam tatanan adat Minangkabau memiliki dua peran, yaitu di dalam kaum sebagai kemenakan, sebagai Mamak dan sebagai Penghulu. Peran laki-Laki di luar kaum (keluarga) atau Persukuan, adalah sebagai Sumando dan kaum dari Persukuan. Seorang ibu Minangkabau seyogyanya menguasai terminologi hubungan kekerabatan Minangkabau, walaupun ia hidup dalam keluarga batih, sehingga nilai-nilai yang biasa berlaku dalam masyarakat Minangkabau secara umum dapat diteruskan kepada anak-anaknya.

keluarga sakinah di masyarakat Minangkabau dan Islam tergambar bahwa dalam hukum adat Minangkabau perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata“, tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan ketetanggaan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka diberikan rekomendasi bahwa diperlukan penguatan ikatan keluarga Minangkabau sebagai sistem, yaitu Keluarga harus dilihat sebagai suatu sistem yang tidak terpisah satu sama lain, dan harus dapat memahami keberadaan anggota keluarga lainnya. Adanya kecintaan di antara sesama anggota keluarga sehingga lahir sikap dalam membela kepentingan keluarga yang lainnya, sahino samalu, seiya sakata. Adanya kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan dan masalah yang muncul dalam keluarga, sehingga terwujud kebahagiaan keluarga.

Daftar Pustaka

- Abdoel, Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005
- Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Bukhari, Muhammad bin Al Ju`fi, 2009, *Shahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr
- Ali, Muhammad Daud, Tahir Azhary dan Habibah Daud, 1989, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Anshary, M. MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Asnawi, Mohammad, 2004, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 Yogyakarta: Darussalam,
- Azami dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 1977-1978
- Departemen Agama, 1996, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : PT Toha Putr
- Fithri, Widia, 2013, *Mau Kemana Minangkabau? Analisis Hermeneutika atas Perdebatan Islam dan Adat Minangkabau*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2013
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandur Maj
- <http://www.kompasiana.com/andrise/globalisasi-perempuan-minang-antara-adat-agama-dan-serbuan-budaya-feminis-kapitalis>
- Jamna, Jamaris, 2004, *Pendidikan Matrilineal*, Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau,
- Kamaluddin, Syafrudin Halimy, 2005, *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, Padang: Hayfa Press,
- Kementerian Agama RI, 2015, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI
- Leter, Bagindo M., 1985, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya
- Masyhur, Mustafa, 1999. *Qudwah Di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press
- Muhammad, Syaikh kamil, uwaidah, 1998, *Fiqih Wanita* Edisi, Penerjemahan Fhoffar , M. Abdul E.MJakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Navis, A.A, 2015, *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Padang: Grafika Jaya Sumbar

- Nizar, Hayati, 2004, *Bundo Kandung dalam Kajian Islam dan Budaya*, Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau, 2004
- Radjab, Muhammad, 1969, *Sistem Kekeabatan di Minangkabau*, Padang: Center For Minangkabau Studies Press, 1969
- Saleh, K. Wantjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Samad, Duski, 2003, “*Tradisionalisme Islam di Minangkabau: Dinamika, Perubahan dan Kontinuitasnya*”, Tajdid: Jurnal Nasional Ilmu-ilmu Ushuluddin (Juli 2003),
- Setyawati, Sri, 2006, *Dari Pedalaman Minangkabau ke Pelosok Mentawai, Perempuan, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Adat*, Padang: Andalas University Press
- Shalihin, Nurus, 2014, *Demokrasi di Nagarnya Para Tuan*, Padang: Imam Bonjol Press
- Sjarifoedin, Amir Tj.A, 2010, *Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, Jakarta: PT Gria Media Prima,
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
- Sukmasari, Fiony, 1983 *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jakarta: CV. Karya Indah
- Toeah, Datoek, tt, *Tambo Alam Minangkabau*, Cet. XIII, Bukittinggi: Pustaka Indonesia
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta. Sinar Grafika
- Wignjodipoere, Moerjono, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung,
- Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam : Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* Andalas University Press
- Yunus, Yurizal, 2015, *Minangkabau Social Movement*, Padang: Imam Bonjol Press
- M.S, Amir, 2011, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Citra Harta Prima
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Adat Bandung*: Citra Aditya Bakti